

LAMPIRAN

Lampiran Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Nama Informan	: Annawati Suwarno
Tanggal Wawancara	: 24 Oktober 2024
Waktu Wawancara	: 08.04
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Pembina Pamsimas
Nomor Telepon Informan	: 081328373208

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan Pamsimas dari tahap pertama sampai tahap ke-tiga?

Pamsimas awal dimulai tahun 2008, dari Pamsimas satu, dua, tiga, sampai sekarang ini istilahnya keberlanjutan yaitu tahap keempat. Soalnya yang tiga kemarin berakhir di tahun 2021. Nah ini ada usulan Pamsimas baru, ada istilahnya usulan Pamsimas keberlanjutan/pengembangan. Sampai posisi sekarang itu di Purworejo sudah ada 234 desa yang memperoleh kegiatan Pamsimas. Jadi kan kalau sudah terbangun kita serahkan ke desa untuk dikelola oleh KPSPAMS, jadi yang mengelola oleh KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyedia Air Minum Masyarakat) di masing-masing desa itu. Sehingga keberlangsungannya, istilahnya berjalan bagus ataupun nanti ada kendala terus kok itu berhenti ya dari pengelolaan KPSPAMS nya sendiri yang tidak berjalan.

Di Pamsimas sekarang Dinas PUPR sebagai pembina Pamsimas dan mengajukan usulan ke pusat lewat. Jadi mengusulkan kegiatan ke pusat, setelah disetujui turun anggaran pamsimas. Di tahun 2024 ini kan ada 6 desa. Nah ini untuk pengerjaannya adalah pemberdayaan masyarakat. Anggaran langsung masuk ke desa, 400 juta ke desa lalu pelaksanaan langsung dilaksanakan oleh POKMAS Desa. POKMAS itu membangun sistem penyediaan air minum baik itu dari sumber air, tower, sampai ke rumah dan perpipaan itu semua itu dikerjakan oleh masyarakat. Karena Pamsimas ini pemberdayaan masyarakat dan didampingi oleh fasilitator pendamping pamsimas yang berjumlah 3 orang.

2. Siapa saja yang menjadi pengelola dan pelaksana Pamsimas dalam implementasi program?

Kalau pengelola dilakukan oleh desa, pengelolaan Pamsimas oleh desa dan dilaksanakan oleh KPSPAMS. Jadi kita hanya sampai pembangunan, pembangunan fisiknya sumber air, tower sampai ke keran desa membangun rumah. Setelah sudah mengalir dan sudah *clear* kita serahkan ke desa. Jadi kita serah terimakan ke desa untuk pengelolaan keberlanjutannya. Jadi dinas hanya membantu sampai ke pembangunan, pembangunan sampai jadi. Pemanfaatannya kita serahkan ke desa, untuk pengelolaannya juga.

Dinas-dinas yang terkait saat ini, dulu Dinpermades/DPPAPMD karena hubungannya dengan BUMDes kaya gitu terus dana desa, Dinkes karena di kualitas airnya, Bappeda istilahnya juga ikut dalam perencanaan penyusunan usulan. Selama itu yang masuk di POKJA kemarin yang istilahnya di Pamsimas

bersama dengan DPUPR. Dinperkimtan untuk Pamsimas tidak terlibat, memang dulu air minum itu di sana terus tahun 2022 dipindah ke DPUPR otomatis tidak ikut dalam POKJA. Dinperkimtan itu Pamsimas Di sana dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Sebelumnya DPUPR 2008-2016, terus 2017 Dinperkimtan misah dari DPUPR. Pamsimas di sana sampai tahun 2021. Terus mulai 2022 ini dikembalikan ke DPUPR.

Konsultan Pamsimas tingkat Kabupaten yang dulu ada DC sebagai koordinator kabupaten mulai tahun 2008-2021. Dibawahnya ada co DC. dibawahnya ada Tim Fasilitator Masyarakat/FS (Fasilitator Senior), dibawahnya lagi ada Fasilitator Desa (3 orang), Fasilitator Pendamping, Fasilitator Teknik, Fasilitator Pemberdayaan. DPMU dari Pemerintah Kabupaten semua. Kecamatan ikut dalam monitoring pelaksanaan Pamsimas. Setelah tahun 2022 DPMU sudah tidak ada dan POKJA sekarang POKJA PKP yang lingkup kerjanya luas ada permukiman dan kesehatan, sedangkan AMPL hanya air minum. Kepala POKJA PKP adalah Bappeda dan beranggotakan Dinperkimtan, Dinkes, DPPPPMD, Dinkes, DPUPR. Di Pamsimas sekarang Dinperkimtan tidak ikut.

3. Bagaimana hubungan masing-masing pengelola dan pelaksana dalam implementasi Program Pamsimas?

Untuk masing-masing dinas hubungannya bagaimana dalam melakukan pembinaan Pamsimasnya. Kita sering mengumpulkan kelompok pengelola itu, dari dinas mengadakan bimbingan teknis. Bimbingan teknis kepada pengelola KPSPAMS dan tiap tahun itu ada 70an KPSPAMS. Tiap KPSPAMS yang diwakili dua orang pengurus, kita memberikan materi ada yang dari Dinkes, DPPPPMD, dan dari DPUR itu istilahnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pembekalan untuk keberlangsungannya Pamsimas. Jadi tetap harus kerja bareng, maksudnya untuk biar pengelolaannya KPSPAMS itu bisa berjalan terus.

4. Bagaimana Keberlanjutan Program Pamsimas saat ini?

Pamsimas di Kabupaten Purworejo 234, ada 2 yang sudah mati. Di desa Dlangu karena terkena pembangunan rel ganda. Mengakibatkan jalur perpipaan terputus oleh rel ganda. Tidak bisa dihidupkan lagi karena lebih berkuasa KAI nya. Tapi di sana untuk akses air minum sekarang dipenuhi oleh PDAM. Untuk pelayanan air masih bisa tertangani, tapi Pamsimasnya memang sudah tidak bisa. Terus sama Jelok karena dulu bencana tanah longsor, perpipaan dan sebagainya bubar semua dan di sana agak sulit airnya. Maksudnya sumber airnya, di sana sudah berkali-kali mencoba sumur bor kok gak jadi. Sementara untuk adanya air sungai berbagi dengan kebutuhan sawah dan sebagainya. Jadi yang mati 2, terus ada sebagian yang jalan tapi hanya beberapa yang memanfaatkan. Itu kan tergantung pengelolaan masing-masing desa, ada yang memakai sistem pompa pakai listrik. Nah kalau mereka bayar saja tidak mau, otomatis gak bisa berlanjut. Kalau pengeloannya bagus, berjalan bagus. Mereka punya kas itu ada. Keberlanjutannya tergantung dari pengelolaan desanya sendiri.

5. Siapa saja yang menjadi pengelola dan pelaksana Pamsimas untuk keberlanjutan program?

Program ini yang mengelola tetap desa, dinas hanya melakukan pembinaan.

6. Bagaimana hubungan masing-masing pengelola dan pelaksana Program Pamsimas untuk keberlanjutan Program?

Sebagian ada KPSPAMS wilayah A misalnya terus wilayah B ada yang membutuhkan. Ini bisa nyambung berbagi sumber air asalkan mau bayar tarif yang ditentukan. Terus juga di kelompok asosiasi itu kan mereka bisa saling tukar pengetahuan. Seperti KP pengurus di sana perpompaan berapa. Ketika kumpulan mereka juga bertukar pengetahuan terkait bagaimana mengelola Pamsimas. Waktu melakukan pembinaan menjadi kesempatan bagi pengelola untuk saling bertukar informasi. Disini yang sudah produksi air kemasan adalah Nglaris, disana mereka sudah sampai tahap membuat air kemasan gelas.

7. Dalam implementasi dan keberlanjutan program ini apakah swasta terlibat?

Karena kalau seperti ini tergantung masing-masing desa, di Desa Pringgo berkerja sama dengan perpompaan Wilo. Adanya transaksi atau kerjasama, desanya yang mengurus. Kerjasama dulu memang ada tawaran berupa kredit untuk pengembangan namun tidak ada KPSPAMS yang ambil karena memang berat setiap bulan harus nyicil. Waktu itu ada program tawaran pengembangan Pamsimas berupa kredit dari Bank Purworejo. Program dari pusat menggandeng daerah, lalu daerah yang menggandeng Bank Purworejo dan KPSPAMS bisa kredit di Bank Purworejo. Meskipun diberi keringanan untuk melakukan peminjaman dan tetap ada kewajiban membayar cicilan tapi KPSPAMS tidak ada yang mengambil karena merasa berat untuk pengembalian. Daripada punya tanggungan hutang memilih jalan seadanya. Swasta sendiri pun tidak begitu berperan.

LSM juga tidak terlibat dalam Program Pamsimas.

8. Bagaimana pembagian peran pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan Program Pamsimas?

Pemerintah sebagai pembina, swasta ada yang membantu dalam penyediaan barang, dan masyarakat ada *inkid* dan *incash*. Dalam tahap pembangunan Pamsimas syaratnya harus ada *inkid* dan *incash*. Ada *incash* uang kas yang harus mereka setor dimasukan rekening dan *inkid* itu tenaga kerja. Diharapkan masyarakat dengan ikut berperan untuk merasa memiliki kegiatan itu. Di pembangunan setelah selesai diserahkan ke KPSPAMS. Pengelolaan dikelola KPSPAMS itu ada tarif-tarif sendiri. Nah keberlangsungannya itu.

Di KPSPAMS yang menjadi pengurus masyarakat yang dimusyawarahkan dan ditunjuk oleh mereka sendiri terus ditetapkan dengan SK Kepala Desa. *Dirembug* tarif air per m^3 berapa misalnya Rp1.500/ m^3 terus biaya beban Rp3.000 atau Rp5.000 itu sudah kesepakatan masing-masing desa. Jadi tiap-tiap desa untuk tarif beda-beda. Untuk peran masing-masing desa juga beda-beda.

Kalau kuncinya di pengelolaan Pamsimas di masing-masing desa dan yang mengelola masyarakatnya ditetapkan dengan SK Kepala Desa, dinas tidak ikut. Kita hanya monitoring dan pembinaan.

9. Apakah dalam pelaksanaan program masing-masing pihak sudah menjalankan perannya dengan baik dalam implementasi dan keberlanjutan program?
Sudah

10. Apa saja yang mendukung masing-masing pihak berperan dalam program ini?

Dinas memang ada tupoksi untuk memenuhi akses air minum di Kabupaten Purworejo. Kita berusaha mengusulkan anggaran ke pusat karena untuk dana APBD itu kecil. Anggaran untuk air minum itu besar sehingga diusulkan ke pusat. Bisa lewat Program Pamsimas untuk air minum juga lewat program Dana Alokasi Khusus SPAMS. Untuk memperoleh DAK itu syaratnya harus sudah desa Pamsimas. Misalnya di Tahun 2020 Desa A mendapatkan Pamsimas ditahun 2022 mereka bisa mengusulkan DAK SPAMS untuk memenuhi target 100% akses desa untuk pengembangan. Tapi kalau belum pernah Pamsimas bisa mengusulkan jadi namanya Pamsimas regular. Pamsimas awal itu Pamsimas Regular.

11. Apakah ada hambatan dalam menjalin relasi antara, pemerintah, swasta, dan masyarakat?

Hambatan seabarnya tidak ada. Cuma kadang di pengelola-pengelola setelah dikasih bantuan sudah jadi dimanfaatkan ternyata dibelakangnya terus mangkrak. Mangkraknya kerena misalnya listrik, pada akhirnya mereka tidak mampu membayar listriknya terus berhenti. Nah sering sedikit kecewa, tapi memang ada biaya listrik tinggi terus masyarakat kurang kesadarannya. Mereka merasa kemahalan mending gak usah bayar. Otomatis Pamsimasnya gak bisa jalan karena pakainya lewat listrik.

12. Apa saja hambatan dalam menjalin relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat?

Kalau masyarakat sebagai pengurusnya itu ada karena diawal kegiatan Pamsimas tidak ada honorinya. Mereka secara sukarela untuk kepentingan orang lain, diawal itu. Nanti misanya pengelolaan itu berkembang, ada kas baru mereka bisa menerima honor walau cuma Rp100.000 sebulan atau Rp50.000 sebulan. Tidak ada gaji, jadi memang diawal kepengurusan sampai beberapa tahun tidak berhonor. Honor itu baru ada kalau sudah berjalan 5 tahun ke atas karena memang penarikan untuk persediaan dan pemeliharaan. Untuk dialokasikan ke honor setara UMR saja sebulannya hanya sampai Rp50.000-Rp100.000. Jadi orang yang sudah masuk situ biasanya kalau sudah tua mau berhenti, tidak ada yang mau menggantikan tidak ada karena dari gaji tidak mencukupi. Kendala di pengurusan itu, kecuali kalau bisa dimasukkan ke BUMDes bisa mendapatkan honor. Namun tidak semua masuk ke BUMDes tapi ada beberap. Yang masuk kepengelolaan BUMDes contohnya Bapang sari menjadi salah satu unit usaha di BUMDes. Keuntungan masuk di BUMDes juga kan kalau ada kerusakan bisa minta anggaran di desa. Dari gaji juga nanti masuknya di pegawai perangkat desa.

Dalam kegiatan pembinaan dan monitoring tidak ada hambatan. Mereka malah antusias, merasa diperhatikan. Kadang mereka curhat gini-gini, kadang kita tidak bisa mengusulkan. Cuma kadang kita menyarankan masuk BUMDes supaya misalkan pompa mahal diatas 20an juta jadi kalau dikelola BUMDes bisa diadakan. Namun beberapa ada yang belum siap kalau masuk BUMDes karena masih ingin dikelola sendiri. Jadi dinas hanya mengarahkan, untuk keputusan dikembalikan ke masing-masing pengelola.

13. Bagaimana masing-masing pihak mengatasi hambatan tersebut?

Dinas hanya mengarahkan kalau mau ikut di BUMDes.

14. Apa saja dampak positif dari relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi dan untuk keberlanjutan Program Pamsimas?

Manfaatnya terasa diawal-awal pembangunan. Sedangkan untuk setelah pembangunan sudah diserahkan ke masing-masing pengelola untuk dikelola sendiri. Pengelolaannya masih bisa berlangsung lama, pemanfaatan air bisa dirasakan sampai ke anak cucu. Kita senang kalau masih tetap berjalan. Kadang yang tidak jalan itu karena kondisi alam. Ada beberapa di daerah Pituruh dan Kutoarjo Pamsimasnya yang *mandeg* karena airnya mengandung Fe (besi), airnya menjadi kuning. Kalau dari pengurusnya tidak sering menguras membersihkan bak penampungan air otomatis airnya tidak enak dan pengguna Pamsimasnya yaitu masyarakatnya tidak mau terus *mandeg*. Di dekat Grabag dan Ngombol airnya bisa menjadi asin padahal awalnya tidak. Ada desa yang dulunya bagus, dalam 2 tahun airnya jadi asin otomatis masyarakat tidak mau lalu pindah ke PDAM. Sekarang PDAM sudah bisa ke Grabag dan Ngombol. Kendala terbanyak di daerah pesisir karena airnya menjadi asin atau *amet* yang mendekati tidak enak.

Transkrip Wawancara

Nama Informan	: Imron Rosadi
Tanggal Wawancara	: 28 Oktober 2024
Waktu Wawancara	: 09.48 WIB
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Ketua BPSPAMS Desa Jetis
Nomor Telepon Informan	:082138082399

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan Pamsimas dari awal ikut program sampai sekarang?

Dari awal program kita mendapat perkembangan yang signifikan khususnya untuk pelanggan yang awalnya 30 KK sekarang sudah mencapai 500 KK. Kita mulai dari PNPM tahun 2009 lalu dilanjutkan dengan Pamsimas tahun 2012.

Dari awal ikut Pamsimas tidak langsung ke BUMDesnya. BUMDes Jetis baru ada di tahun 2020. Lalu kita masuk ke BUMDes. Sebelumnya murni dari BPSPAMS (masyarakat) baru setelahnya ke BUMDes.

Pengajuan Desa Pamsimas dibuat dulu proposalnya baru diajukan dan waktu pengelolaan pembangunan setelah mendapatkan dana dari Pamsimas yang mengelola LKM. Setelah menjadi bangunan lalu disahkan ke Desa yang selanjutnya diserahkan ke BPSPAMS. Disetiap ada program, di tahun itu juga pembangunan selesai, satu tahun selesai pembangunan.

2. Siapa saja yang menjadi pengelola dan pelaksana Pamsimas dalam implementasi program?

Penasehat: Abu Rohani

Penanggung jawab: Kepala Desa

Ketua: Imron Rosadi

Bendahara: Purwo Yuniarto

Operator: Ahmad Khalim

Teknisi: Mariyanto, Ahmad Tahsis, dan Prabowo

Kasir: Taufiq Hidayat

3. Bagaimana hubungan pengelola dan pelaksana dalam implementasi Program Pamsimas dengan pemerintah dan masyarakat?

Kita beda sama pemerintah – kita diluar pemerintah. Namun ada beberapa pelaksana dari pemerintah desa untuk menumpang untuk melaksanakan sendiri karena kita belum bisa menggaji sesuai dengan UMR Purworejo. Jadi kita double job antara sebagai pegawai pemerintah desa dan dengan BPSPAMS.

4. Bagaimana Keberlanjutan Program Pamsimas saat ini?

Masih berlangsung dengan sangat baik. Namun masih ada kendala-kendala walaupun sedikit kita selesaikan.

5. Siapa saja yang menjadi pengelola dan pelaksana Pamsimas untuk keberlanjutan program?

Dalam tahap pembangunan fisik dulu oleh LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) kalau yang dari Pamsimas, lalu diteruskan oleh BPSPAMS. Diserahkan ke desa lalu desa membuat BPSPAMS. Anggota LKM diantaranya

ada Abu Rohani dan Imron Rosadi. LKM yang mengelola dan melaksanakan terlebih dahulu, setelah pembangunan selesai dibuatkan BPSPAMS.

6. Bagaimana hubungan pengelola dan pelaksana Program Pamsimas dengan pemerintah dan masyarakat untuk keberlanjutan Program?

Tetap ada hubungan dengan pemerintah daerah khususnya tentang kebersihan air. Setiap tahun ada pemeriksaan air dari Dinkes, DPUPR bagian sarana dan prasarana, dan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan BPSPAMS dengan DPPPPMD.

7. Dalam implementasi dan keberlanjutan program ini apakah swasta terlibat? Kita berkerjasama juga dengan swasta yaitu dengan Bank Purworejo. Mengambil pinjaman untuk penambahan dana sejak tahun 2022. Diawal ikut Program Pamsimas tahun 2012 belum mengambil pinjaman ke Bank Purworejo. Baru ditahap keberlanjutannya ikut mengambil pinjaman di Bank Purworejo.

8. Bagaimana pembagian peran pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan Program Pamsimas?

Bank berperan sebagai pemberi kredit saja. Pemerintah Daerah Kabupaten, karena kita 2012 dapat Pamsimas, 2014 dapat lagi juga, 2018, dan terakhir tahun 2020 dengan mengajukan proposal terus. Walau sudah dapat di tahun 2012 bukannya akan terus mendapatkan, tapi perlu mengajukan proposal lagi. Yang Pemerintah Kabupaten satu kali di tahun 2014, di tahun lainnya di APBN semua. Di tahun 2012 sudah ada pendanaan luar negeri dari World Bank, baru pakai dari dana LN tahun 2014. Di tahun 2018 pakai dana hibah kabupaten. Yang dari APBN yang dari LN sampai Pamsimas tahun 2021. Peran masyarakat dalam implementasi membantu kita dalam rangka desa sebagai desa yang sehat bebas BABS. Kita mendapat bantuan dari masyarakat untuk membuat jamban sehat dan sebagainya. Sekarang kita sudah mendapatkan sertifikat bebas BABS. Dalam perencanaan masyarakat tetap kita libatkan. Dalam pembangunan fisiknya kita ada dana dari pemerintah dan swadaya dari masyarakat walau hanya dengan tenaga yang diuangkan. Masyarakat tidak ditarik ketika pembangunan fisik bahkan diuangkan tenaga itu dalam laporan kita artinya dihitung dalam bentuk uang gaji per hari. Dalam keberlanjutannya tetap dilibatkan terus dengan meminta masyarakat dalam perencanaan-perencanaan desa untuk melaporkan ke BPSPAMS ketika ada keluhan terkait Pamsimas, seperti membantu dalam monitoring.

9. Apakah dalam pelaksanaan program masing-masing pihak sudah menjalankan perannya dengan baik dalam implementasi dan keberlanjutan program?

Perannya sangat signifikan dan membantu karena sekarang sudah diserahkan ke desa dengan bentuk BPSPAMS dan sudah tidak ada lagi Pamsimas. Sudah ikut program 4 kali, sekarang bersama Pemerintah Desa menggunakan DD (Dana Desa).

10. Apa saja yang mendukung masing-masing pihak berperan dalam program ini?

Dana dari Pemerintah Desa terutama untuk operasional karena operasional sangat besar dari air itu dalam hal mesin. Dalam Pamsimas ini pakai mesin semua.

11. Apakah ada hambatan dalam menjalin relasi antara, pemerintah, swasta, dan masyarakat?

Dari masyarakat khususnya untuk pembayaran sering banyak yang nunggak. Namanya masyarakat tidak bisa menekan dengan disiplin sehingga agak lentur dengan peraturan yang sudah ada. Dalam pembangunan fisiknya tidak ada kendala kalau sudah ada dana dari DD kita pengajuan lalu kita laksanakan. Dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten tidak ada kendala. Dari swasta tidak ada kendala karena kita baru menjalin kerjasama tahun 2021, sehingga dikeberlanjutan tidak ada kendala.

12. Bagaimana masing-masing pihak mengatasi hambatan tersebut?

Dalam mengatasi masyarakat yang nunggak pembayaran kita mengirimkan surat tagihan untuk mengingatkan dan memberi peringatan kepada masyarakat. Mekanisme mengirimkan suratnya, bersama dengan Kepala Desa menyampaikan surat tersebut dan Kadus untuk mengingatkan masyarakat segera melunasi atau mengangsur sesuai jumlah tagihan yang ada. Hal tersebut cukup membantu karena ada Pak Kades dan Pak Kadus sebagai tokoh masyarakat setempat.

13. Apa saja dampak positif dari relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi dan untuk keberlanjutan Program Pamsimas?

Dampak positifnya kita bisa berjalan dengan baik dan kendala-kendala bisa diselesaikan antara dengan pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Transkrip Wawancara

Nama Informan : Abu Rohani
Tanggal Wawancara : 2 November 2024
Waktu Wawancara : 09.24-09.56 WIB
Jabatan/Pekerjaan Informan : Penasehat LKM Tirta Makmur
Nomor Telepon : 082225936127

1. Bagaimana perkembangan pengelolaan Pamsimas dari awal Pamsimas masuk tahun 2012 sampai sebelum diserahkan ke desa tahun 2020?
Pengelolaannya hampir sama antara pemasukan dan operasionalnya kan kurang seimbang karena harusnya tarif tidak segitu tapi karena warga kalau tarifnya dinaikkan mereka juga mungkin keberatan. Padahal operasionalnya sini pakai listrik semua dan pakai mesin semua. Yang namanya elektro rawan ya, kadang-kadang bisa awet bisa tidak. Akhirnya sampai sekarang untuk pengembangan susah padahalkan dengan bertambahnya konsumen harusnya kan ada pengembangan penambahan sumber air bersih. Pengembangannya hanya mengandalkan dana dari pemerintah dan untuk swadayaan susah. Padahal pemerintah kan juga, namanya sudah berkali-kali mendapatkan bantuan, kan tidak bisa terus menerus. Nah sekarang kan sudah beberapa tahun tidak mendapatkan bantuan. Akhirnya kekuarangan sumber air karena tidak ada pengembangan. Apalagi dimusim kemarau kadang-kadang kurang debitnya. Hal ini yang menyebabkan air sering mati karena kekurangan sumber air. Pada musim kemaru kendalanya sumber air debitnya berkurang tapi pemakainnya lebih. Kalau ketika musim penghujan warga tidak melakukan penyiraman tanaman tapi kalau kemarau mereka menyirami tanaman di lingkungan. Itu yang menyebabkan debitnya kurang sedangkan pemakaian bertambah.
2. Siapa saja yang menjadi pengelola dan pelaksana Pamsimas di LKM?
LKM, ketika ada proyek disusun bermacam-macam kepengurusan termasuk ada LKM, termasuk ada juga pelaksana pembangunan dan sebagainya dulu termasuk yang dilibatkan di pelaksana harian. Di pelaksana harian saya hanya sebai penasehat saja. Untuk pelaksana harian Mas Imron ketuanya, ada bendahara oleh Bayan Dusun Mlilir, operator oleh Bayan Khalim, teknisi oleh Pak Maryanto, Mas Bowo, dan Mas Taksis.
3. Bagaimana keberlanjutan Program Pamsimas saat ini?
Perkembangannya untuk ke depan menambah sumber air bersih, rencana anggarannya dari pemerintah (kabupaten atau provinsi atau pusat) atau dari dana desa.
4. Siapa saja yang menjadi pengelola dan pelaksana Pamsimas untuk keberlanjutan Pamsimas?
BPSPAMS
5. Dalam implementasi program ini apakah swasta terlibat?

Tidak ada keterlibatan swasta dalam implementasi program. Paling terlibat dalam penyedia barang hanya sebagai penjual tanpa ada kerja sama atau sejenisnya dan dalam keterlibatan memberikan anggaran itu tidak.

6. Bagaimanakah peran pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Program Pamsimas ini?

Bagus, artinya pemerintahan desa sering memberikan dana desa untuk membantu kekurangan anggaran. Biasanya hanya untuk sarana untuk membeli pompa. Untuk masyarakat mungkin nilainya rata-rata kurang bagus karena yang namanya air bersih itu dalam satu minggu hidup dan satu hari mati saja mungkin dikatakan tidak pernah hidup. Padahal dari pengurus sudah berusaha maksimal, mungkin ada listrik mati atau mungkin waktu ada perbaikan baik pompa maupun pipa. Jadi rata-rata masyarakat menilai kurang bagus walaupun dari panitia juga berusaha maksimal. Itu lah karena air bersih tidak seperti listrik. Begitu hidup, hidup semua. Air bersih yang bawah mungkin sampainya lama, yang jauh pun lama. Apalagi kalau listrik satu hari mati itu untuk menaikkannya susah dan kendalanya kalau air sudah di dalam pipa sudah terkena udara itu dorongnya susah sekali untuk mengalir sehingga teknisi harus mengecek. Nah warga tidak tau.

Untuk pembangunan fisiknya berupa bak penampungan airnya masyarakat tidak semuanya terlibat. Semuanya murni dari anggaran pemerintah karena sudah ada anggaran tenaga dan sebagainya. Dalam membuat bak penampungan itu tukang bukan masyarakatnya sendiri. Hanya untuk pekerja kan dari Dinas Lingkungan Bina Masyarakat. Menggunakan tenaga dari bina lingkungan.

Dalam perencanaan yang dilibatkan paling perangkat desa dan pendamping sebagai perwakilan masyarakat. Dari perencanaan, gambar-gambar, sampai SPJnya pun juga ada pendampingan kabupaten karena Pamsimas itu ada panitia kabupaten jadi disana sudah ada pendamping bagian mungkin teknisi, keuangan melalui dinas-dinas terkait.

7. Apa saja yang mendukung masing-masing pihak berperan dalam program ini?

Tokoh masyarakat seperti BPD, LPMD. Seperti ketika mau ada kenaikan tarif itu harus ada musyawarah baik dengan desa dan lembaga masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat sudah terwakili oleh BPD dan LKMD.

8. Apakah ada hambatan dalam menjalin relasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat?

Dari Pemerintahan Desa dan Kabupaten kalau namanya anggaran mereka juga dibagi-bagi ke desa sekabupaten. Sehingga kalau mendapat bantuan juga mungkin dengan ada jarak begitu lama. Kabupaten juga melihat dari banyak desa apalagi Desa Jetis sudah berkali-kali mendapat bantuan dari beberapa tahun lalu. Dengan Pemerintah Desa memberikan bantuan dari dana desa. Masyarakat ada laporan kalau sandainya ada kerusakan jaringan.

9. Apa saja hambatan dalam menjalin relasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dan bagaimana masing-masing pihak mengatasi hambatan tersebut?

Kalau pencairan dana bantuan dari kabupaten paling minta dana desa. Kabupaten biasanya dana proyek yang besar dan untuk misalnya pembelian pompa menggunakan dana desa. Kalau untuk pembelian pompa kan tidak mungkin, karena program lengkap mulai dari pembangunan sumber air, jaringan pipa, dan bak penampungannya. Kalau seperti yang kecil-kecil ke pemerintahan desa menggunakan dana desa.

Misalnya ada kendala di masyarakat, masyarakat hanya lapor saja ke panitia desa. Setelah mendapatkan laporan nanti bagian teknisi yang memperbaiki.

10. Apa saja manfaat atau dampak positif dari relasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi dan untuk keberlanjutan Program Pamsimas?

Untuk Pemerintah Desa jelas itu merupakan kemajuan desa. Karena air sumber utama kebutuhan. Kalau desa sudah tercukupi warganya berarti sudah maju dan karena nanti menunjukkan kesehatan masyarakat termasuk bisa mengadakan bebas BABS karena sudah ada air bersih juga kesehatan masyarakatnya membaik.

11. Bagaimana alur mendapatkan Program Pamsimas ini?

Karena dari pemerintah ada program, pemerintah desa mengajukan permohonan dengan membuat proposal. Pengurus dan pelaksana harian tinggal menjalankannya saja.

Lampiran Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembulang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 7465407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: [fisip\[at\]undip.ac.id](mailto:fisip[at]undip.ac.id)

Nomor : 01974/UN7.F7/PP/X/2024

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jl. Proklamasi No. 2, Purworejo

Dalam rangka mempersiapkan penulisan Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro maka mohon izin untuk melaksanakan penelitian dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo.

Adapun nama dan data mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: RIFKA TRISNI NURAINI
Nomor Induk Mahasiswa	: 14010118120018
Judul	: Implementasi Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) sebagai Upaya Menciptakan Good Governance Kabupaten Purworejo: Relasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Alamat Rumah	: Jetis, Loano, Purworejo
Alamat Email	: nurainirifka119@gmail.com
Nomor Telepon	: 08224777241

Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terimakasih.

Semarang, 16 Oktober 2024

Dekan

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP. 196908221994031003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111
Telp. (0275)325202, Faksimile (0275)325202
Laman: www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 562.42/228/2024

- I. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- II. Menunjuk : Surat Pengantar dari Universitas Diponegoro, (Nomor: 01974/UN7.F7/PP/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024) Hal: Permohonan Izin Penelitian
- III. Bupati Purworejo memberi Surat Keterangan Penelitian untuk melaksanakan Penelitian dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :
- | | |
|--------------------------------|--|
| v Nama | : RIFKA TRISNI NURAINI |
| v Pekerjaan | : Mahasiswa |
| v NIM/NIP/KTP/ dll. | : 3306156607990003 |
| v Instansi / Univ/ Perg.Tinggi | : Universitas Diponegoro |
| v Program Studi | : S1 Ilmu Pemerintahan |
| v Jurusan | : Ilmu Pemerintahan |
| v Alamat | : Tegalsari, Jetis Kec. Loano Kab. Purworejo |
| v No. Telp. | : 082247777241 |
| v Penanggung Jawab | : D. Ghulam Manar, S.IP, M.Si |
| v Maksud / Tujuan | : Penelitian |
| v Bidang Penelitian | : Implementasi Program Pamsimas |
| v Judul | : Implementasi Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) sebagai Upaya Menciptakan Good Governance Kabupaten Purworejo: Relasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat |
| v Lokasi | : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo |
| v Lama Penelitian | : 2 Bulan |
| v Jumlah Peserta | : 1 orang |

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melaksanakan Penelitian, untuk melaporkan kepada :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- b. Hasil Penelitian digunakan sesuai tujuan Penelitian.



Dokumen telah ditandatangani secara Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- c. Peneliti berkewajiban menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk hard copy dan soft copy pada Bupati Purworejo, dengan tembusan BADAN KESBANGPOL Kabupaten Purworejo dan BAPPEDALITBANG Kabupaten Purworejo.

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku dari tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.

Dikeluarkan di : Purworejo
Pada : 18 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,



Ditandatangani
secara elektronik oleh:

GATHOT SUPRPTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala BAKESBANGPOL Kab. Purworejo;
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Purworejo;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
4. Instansi terkait Se-Kabupaten Purworejo;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.



Dokumen telah ditandatangani secara Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Annawati Suwarno selaku Pembina Pamsimas dari DPUPR pada 24 Oktober 2024



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Imron Rosadi Selaku Ketua BPSPAMS Desa Jetis pada 28 Oktober 2024



Dokumentasi dengan Bapak Abu Rohani Selaku Penasehat LKM Tirta Makmur
pada 2 November 2024